

**IMPLEMENTASI PERDES NO 2 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA CIBEBER
KECAMATAN MANONJAYA KABUPATEN TASIKMALAYA**

Yasir Abdul Aziz

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : yasirabdaziz25@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya belum optimal. Karena 9 indikator dari 4 dimensi yang menajadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah implementasi, masih ada 4 indikator yang terdapat hambatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (orang). Hasil penelitian diketahui 2 dimensi sudah optimal diantaranya dimensi disposisi, dan dimensi struktur birokrasi, sedangkan 2 dimensi yang belum optimal yaitu dimensi komunikasi, dan dimensi sumber daya. Hambatan-hambatan yang ditemui, diantaranya: Sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Desa serta Pihak BUMDes belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, terbatasnya anggaran yang diberikan Pihak Desa kepada BUMDes sehingga beberapa program BUMDes belum bisa berjalan, serta kekurangan pada sumber daya manusia yang hanya ada 3 orang saja sehingga para pengurus BUMDes merasa harus ada penambahan pengurus terutama laki-laki. Upaya yang sudah dilakukan oleh Pihak Desa dan Pihak BUMDes mengenai hambatan yang ada yaitu melakukan musyawarah dengan semua pihak demi menemukan solusi terbaik untuk mengatasi hambatan. Pengurus BUMDes juga menjalin beberapa kerjasama dengan pihak ke 3 untuk mengatasi hambatan terbatasnya anggaran.

Kata Kunci : *Implementasi, Pembentukan dan Pengelolaan, BUMDes.*

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian paling penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap Lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dilakukan antara lain: Pengembangan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa mengintegrasikan produk ekonomi kreatif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan, menguatkan kelembagaan ekonomi desa, mengembangkan unsur-unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa bertujuan agar meningkatkan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

mengedepankan kebersamaan, telah memberikan harapan baru bagi desa maupun perekonomian desa menuju desa mandiri dan juga bukan hanya untuk desa tapi juga masyarakat. Salah satu tujuan disahkannya Undang-Undang tentang Desa merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Pusat terhadap Desa untuk membangun Desa menuju Desa yang mandiri. Bukan hanya perekonomian melainkan juga potensi desa.

Kesan yang kuat dalam pembentukan Undang-Undang Desa ini adalah keinginan pemerintah desan membangun perekonomian desa yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa dengan istilah BUMDes. Badan Usaha Milik Desa bukanlah hal baru dalam pemerintahan Desa, upaya yang dilakukan yaitu untuk memberikan hasil yang berdampak positif bagi desa maupun masyarakat, regulasi desa dengan di adakannya Undang-Undang ini harus mampu meningkatkan perekonomian desa dan menjadikan desa mandiri. Untuk itu desa harus bisa memberikan implementasi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Perdes Desa Cibeber Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Mandiri Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Pasal 87 Badan Usaha Milik Desa ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut

BUMDes. Ayat (2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Ayat (3) BUMDes dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang. Pasal 88 ayat (1) pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa ayat (2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan dengan peraturan Desa.

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus di sertai upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten/kota yang memfasilitasi serta melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan pemodal besar. Mengingat BUMDes LembagaEkonomi baru yang beroperasi di perdesaan dan memerlukan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang, maka pemerintah desa berperan membangun dasar pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes adalah pilar kehatian ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial itu berfokus pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya pada penyediaan pelayanan sosial.

Untuk hal tersebut Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya memebentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tanggal 24 September 2019 yang diberi nama “BUMDes TARUNA MANDIRI CIBEBER” dan mulai beroperasi pada sekitar awal Februari 2020. Salah satu

bentuk kerjasama yang dilakukan BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber ini dengan memfasilitasi serta mengajak masyarakat desa Cibeber yang memiliki usaha rumahan untuk bisa menjalin kerja sama dengan BUMDes yang telah dibuat oleh pemerintah Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 177.800.000., dengan pembentukan BUMDes ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cibeber dan pendapatan desa melalui kegiatan usaha ekonomi tersebut. Serta dengan adanya BUMDes di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya ini bisa mengakomodir berbagai usaha ekonomi.

Dengan itu BUMDes Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya mempunyai program kerja di antaranya:

1. Menjaln kerjasama dengan Bank BRI dengan menyediakan agen BRI link di kantor BUMDes.
2. Bersama pemerintah Desa membuat kantor BUMDes.
3. Mengembangkan jaringan dengan BUMDes-BUMDes yang lain sebagai wujud kerjasama membangun usaha.
4. Membangun kerjasama dengan pelaku usaha rumahan di Desa Cibeber.
5. Merealisasikan kerjasama dengan pihak Kantor POS.

6. Merealisasikan kerjasama dengan pihak Bank Jabar.
 7. Merealisasikan kerjasama dengan pihak Pegadaian.
- BUMDes Desa Cibeber terkait dengan program yang kurang optimal yaitu belum terealisasinya kerjasama antara BUMDes dengan pihak Kantor POS, pihak Bank Jabar, dan dengan pihak pegadaian dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ikut mengembangkan berjalannya program BUMDes, dan kendala terkait perihal alokasi dana dari pihak pemerintah yang masih belum turun selama 2 tahun terakhir sehingga kerjasama antara BUMDes dengan ke tiga pihak itu masih belum bisa terealisasikan sampai

Berdasarkan peninjauan awal, Implementasi Kebijakan Desa Tentang Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa Indikator permasalahan berikut:

1. Belum terjadinya komunikasi yang baik antara pihak pemerintah desa, para pengurus BUMDes dengan masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya sehingga tingkat partisipasi masyarakat Desa Cibeber untuk turut serta mengembangkan BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber masih rendah.

2. Masih kekurangan Sumber Daya Manusia yang ditunjukkan oleh hanya ada 3 orang saja yang mengelola BUMDes ini.
3. Masih kurangnya sosialisasi, pengenalan dan pemberitahuan informasi mengenai BUMDes oleh pihak pemerintah Desa dan para pengurus BUMDes kepada masyarakat Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.
4. Masih terdapat kekurangan di bidang sarana dan prasarana serta terhambatnya alokasi dana dari desa untuk BUMDes dikarenakan efek pandemi covid-19 yang sudah terjadi 2 tahun terakhir.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah “Implementasi Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya”?

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah diputuskan oleh legislatif atau pengambilan keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi, dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu

penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahapan suatu kebijakan yang dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan. Pengertian implementasi menurut van Meter dan van Horn (Anggara 2014:231-232) yaitu:

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Hakikat utama implementasi kebijakan menurut Mazman dan Sabatier adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier (Syahrudin 2019:47) mendefinisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan yaitu:

Pelaksanaan Keputusan Kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin dicapai, dan berbagai cara

untuk mengatur proses implementasinya.

Menurut Edward III (Agustino 2017:136-141) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima/ komunikan. Namun, dalam proses tersebut, terdapat unsur, konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya dengan berkomunikasi. Menurut Hovland (Rustan dan Nurhakki Hakki 2017: 30) "Komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi penerima".

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (renewable resources) dan sumber daya tak terbarukan (non-renewable resources).

Ke dalam sumber daya dapat pulih termasuk tanaman dan hewan (sumber daya hayati). Jenis-jenis sumber daya itu sebenarnya ada banyak dan beraneka ragam seperti Sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya yang lainnya.

Menurut Mauson (Maryunani 2018 : 49) :

Sumber daya dapat dibagi menjadi *natural resources*, *human resources*, dan *capital resources*.

1. *Natural Resources atau Non Made Resources*

Natural resources merupakan sumber daya yang tidak bisa diciptakan oleh manusia. Sumber daya ini tercipta melalui melalui proses ilmiah sehingga disebut juga sumber daya alam. Contohnya, yaitu: tanah, air, udara, bahan mineral, keanekaragaman flora dan fauna, dan sebagainya.

2. *Human Resources*

Human resources merupakan sumber daya berupa manusia yang berperan sebagai faktor produksi. Manusia sebagai *human resources* tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen.

3. *Capital Resources atau Man Made Resources*

Capital resources merupakan sumber daya yang diciptakan oleh manusia. Modal yang dimaksud disini adalah investasi yang diperbolehkan melalui

tabungan individu, masyarakat, atau perusahaan yang diperutukan memproduksi barang dan jasa.

3. Disposisi

Disposisi adalah instruksi singkat tentang tindak lanjut (penyelesaian) suatu atau surat masuk. Disposisi dibuat oleh pemimpin untuk staf atau bawahan sesuai dengan bidang keahlian atau otoritas mereka. Tindak lanjut bisa dalam bentuk surat balasan, tindakan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Disposisi sebenarnya memiliki kegunaan dan fungsi untuk mengetahui petunjuk atau tindakan yang harus dilakukan oleh bawahan. Ini bersifat segera yang berarti perintah harus langsung dilakukan dan dikerjakan sesuai petunjuk. Yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah disposisi.

Menurut Edward III (Indiahono 2009:32) :

Disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada

sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer dll. Birokrasi adalah kata yang berasal dari bureaucracy (bahasa Inggris bureau + cracy), yang artinya adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Menurut Weber (Hipludin 2017:76) berpendapat bahwa:

Birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 orang yang terdiri dari Ketua Desa Cibeber 1 orang, Sekertaris Desa Cibeber 1 orang, Kasi Kesejahteraan 1 orang, Ketua BUMDes Taruna Mandiri 1 orang, Sekertaris BUMDes Taruna Mandiri 1 orang, Bendahara BUMDes Taruna Mandiri 1

orang, serta Masyarakat Desa Cibeber 2 orang. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Implementasi Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmaaya dilihat berdasarkan pendapat Edward III (Agustino 2017:136-141) terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

a. Adanya Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan Pengurus BUMDes.

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sudah terlaksana secara optimal karena tidak ada kendala atau hambatan yang berarti dalam koordinasi maupun komunikasi.

Sebagaimana menurut Stoner (Sugandha, 2011:212), koordinasi adalah proses penyatupaduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Berdasarkan teori tersebut bahwa komunikasi itu merupakan suatu proses yang dimana di dalamnya terdapat ide-ide dari suatu atau seorang sumber terhadap sumber

lainnya guna untuk tercapainya sebuah tujuan. Serta komunikasi yang baik pun merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan sebuah implementasi kebijakan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hasil penelitian pada indikator adanya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDes sudah terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari pihak Desa selalu melakukan koordinasi yang menyeluruh terkait apa-apa saja yang ada kaitannya dengan BUMDes. Maka dalam hal ini tidak ditemukan hambatan-hambatan yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

b. Adanya sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat terhadap kemajuan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat terhadap kemajuan BUMDes ini dirasa belum optimal. Adapun hambatan-hambatan yang ditemui atau dirasakan pada pemberian sosialisasi ini seperti kurangnya sumber daya manusia di BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber dengan dilihat dari pemberian sosialisasi yang penyampaiannya dirasa susah untuk dimengerti oleh beberapa masyarakat yang hadir karena sumber daya manusia yang ada tidak memiliki pemaparan materi yang cukup baik, serta seringkali sosialisasi yang dilakukan tidak dihadiri oleh semua pihak yang diundang untuk menghadiri kegiatan tersebut karena adanya

keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada pada pemberian sosialisasi ini dengan memberikan penyampaian materi atau penyampaian apa yang dilakukan ketika sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami oleh semua pihak, serta melakukan jemput bola ketika pada saat pemberian sosialisasi banyak pihak yang tidak bisa hadir supaya pemaparan pun bisa tersampaikan semuanya kepada semua pihak.

Maka dalam pemberian sosialisasi agar dalam pelaksanaannya bisa menjadi optimal pihak Desa dan BUMDes harus bisa dan mampu memberikan penyampaian yang bisa dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Sebagaimana merujuk pada teori menurut Buhler (Haryanto 1978:55) mengatakan,

Pengertian sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

Dari teori diatas agar sosialisasi terhadap masyarakat berjalan dengan optimal maka para pihak Desa maupun pihak BUMDes harus bisa membantu masyarakat guna menjadikan BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber ini untuk kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan awal ketika dibentuk, dan masyarakat pun paham

dengan apa yang di sampaikan serta bisa mengaplikasikannya secara langsung serta dapat berperan langsung dan berfungsi membantu kemajuan BUMDes.

2. Sumber Daya

a. Adanya alternatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang sudah tergali

Berdasarkan hasil observasi wawancara di atas, bahwa adanya alternatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang sudah tergali ini sedang berjalan dan sudah dilakukan oleh pihak BUMDes dengan berusaha memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada bidang sumber daya alam, dengan cara mengikut sertakan beberapa pihak demi mensukseskan program tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian pada indikator tersebut dirasa masih belum optimal. Dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya seperti kekurangan modal dikarenakan ada fenomena Covid-19 yang menimpa Indonesia sejak tahun 2019 sampai 2021, serta faktor cuaca yang beberapa waktu belakangan sulit untuk di prediksi berakibat menjadikan terhambatnya proses pengembangan alternatif dari pengelolaan sumber daya alam. Mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut pihak desa serta bumdes berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memaksimalkan potensi desa di bidang SDA dengan secepatnya supaya hasilnya pun bisa dirasakan langsung oleh semua masyarakat Desa Cibeber.

Adanya alternatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang sudah tergali ini menjadi hal yang sangat membantu mendongkrak dari segi pariwisata desa maupun dari segi ekonomi desa. Sebagaimana menurut Balderton (Adisasmita 2011:21) mengemukakan bahwa “Istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengordinasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan”. Teori tersebut dapat diartikan sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Maka ketika hambatan-hambatan yang ditemui masih belum ada upaya untuk mengatasinya maka belum bisa dikatakan optimal.

b. Adanya pemberdayaan sektor ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya pemberdayaan sektor ekonomi belum terlaksana dengan optimal. Terlihat masih ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala serta hambatan yaitu mengenai masih kurangnya animo masyarakat serta antusiasme masyarakat terkait program pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber, serta kendala yang lain yang dirasakan adalah dalam sektor finansial karena adanya wabah virus covid-19 yang ada di Indonesia menjadikan kucuran dana dari Desa untuk program BUMDes pun tidak ada, dan karena hal

ini BUMDes pun tidak bisa berbuat banyak. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara penjemputan atau dengan istilah jemput bola supaya masyarakat paham dan mau untuk kerja sama dengan BUMDes untuk memasarkan produk UMKM mereka, mengenai upaya yang dilakukan dalam segi biaya, pihak BUMDes sebisa mungkin tidak menjadikan masalah dan mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan.

Sebagaimana menurut Papilaya (Zubaedi 2007:42) , menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata”. Berdasarkan teori tersebut untuk mencapai pemberdayaan untuk membangun kemampuan dan kemaslahatan masyarakat sangatlah penting demi kemajuan sektor ekonomi masyarakat. Apabila dalam realisasinya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditentukan dari suatu program maka penetapannya belum dikatakan optimal.

c. Adanya sumber daya manusia yang kompeten demi kemajuan BUMDes

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya sumber daya manusia yang kompeten demi kemajuan BUMDes belum terlaksana dengan optimal. Karena masih terdapat hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para pelaksana terkait kumlah

pengurus yang dirasa masih kurang khususnya laki-laki, karena selama ini selalu ada pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki terpaksa harus dilakukan oleh perempuan, dan para pengurus BUMDes pun berharap dari pihak pemerintah Desa untuk membantu atau memberikan respon yang bisa menjadi jawaban dari hambatan yang dirasakan oleh pengurus BUMDes. Selain hambatan mengenai kekurangannya pengurus laki-laki, masalah anggaran pun kembali menjadi hambatan dikarenakan 2 tahun kebelakang terjadi wabah yang tidak terduga yaitu pandemi covid-19 yang mewabah di Indonesia berakibat perekonomian negara terganggu sehingga pengalokasian dana untuk BUMDes pun jadi terganggu. Mengenai upaya yang sudah ada untuk mengatasi hambatan-hmbatan tersebut pihak Desa memberikan arahan serta suntukan semangat kepada pengurus BUMDes untuk tidak menjadikan hambatan-hambatan tersebut menjadi faktor penghalang dari produktifnya mereka dalam melaksanakan tugas yang telah ditentukan.

Maka dalam indikator adanya sumber daya manusia yang kompeten demi kemajuan BUMDes agar pelaksanaannya menjadi optimal harus berhasil mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Sebagaimana merujuk pada teori menurut Menurut Sunyoto (Sunyoto 2015:1) menyatakan bahwa “sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam

suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal”. Dari teori ini agar indikator perlu adanya sumber daya manusia yang kompeten demi kemajuan BUMDes harus lebih diperhatikan lagi karena salah satu faktor keberhasilan dalam suatu organisasi dapat dilihat dari bagaimana sumber daya manusianya.

3. Disposisi

a. Adanya komitmen pengurus BUMDes terhadap berjalannya program BUMDes

Hasil penelitian pada indikator adanya komitmen pengurus BUMDes terhadap berjalannya program BUMDes sudah optimal. Dilihat dari tidak adanya hambatan-hambatan yang bisa mempengaruhi kinerja dari setiap pengurus BUMDes serta pengurus BUMDes pun selalu mendapat suntikan semangat dan arahan dari penasihat yaitu Kepala Desa sendiri, supaya mereka bekerja dan menjalankan tugasnya dengan senang hati dan semangat. Sebagaimana pendapat dari Quest (Soekidjan, 2009:33) “komitmen merupakan nilai sentral dalam mewujudkan soliditas organisasi”. Hasil penelitian Quest (Soekidjan, 2009:33) tentang komitmen organisasi mendapatkan hasil :

1. Komitmen tinggi dari anggota organisasi berkorelasi positif dengan tingginya motivasi dan meningkatnya kinerja;
2. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kemandirian dan “Self Control”;

3. Komitmen tinggi berkorelasi positif dengan kesetiaan terhadap organisasi;

4. Komitmen tinggi berkorelasi dengan tidak terlibatnya anggota dengan aktifitas kolektif yang mengurangi kualitas dan kuantitas kontribusinya.

Berdasarkan teori tersebut bahwa komitmen adalah hal yang mempunyai nilai sentral dalam mewujudkan rasa solidaritas dalam organisasi serta komitmen juga mampu menghasilkan kualitas kerja dari setiap diri dan menjadikan faktor keberhasilan juga demi kemajuan BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber.

b. Adanya transparansi antara pengurus BUMDes dengan pihak Desa maupun Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya transparansi antara pengurus BUMDes dengan pihak Desa maupun Masyarakat terkait transparansi nya sudah berjalan optimal. Dimana tidak terdapat kendala apapun dan komunikasi antara pihak BUMDes dengan pihak Desa maupun Masyarakat berjalan dengan lancar. Sebagaimana merujuk pada teori menurut Sabarno (Syahriyatul 2007:38) bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”.

Dari teori diatas perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan

pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

4. Struktur Birokrasi

a. Adanya struktur organisasi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya struktur organisasi pelaksanaan kewajiban kerja dari para pengurus BUMDes sudah optimal, meskipun BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber belum menjadi BUMDes yang terbaik di Kabupaten Tasikmalaya tetapi melihat progres dari hari ke harinya ada peningkatan. Sebagaimana pendapat menurut Robbins dan Coulter (Handoko 2007:284) “struktur organisasi bisa diartikan sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi menggambarkan kerangka menyeluruh menentukan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dikoordinasikan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu organisasi.

b. Adanya ketetapan tupoksi

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator adanya ketetapan tupoksi terkait pelaksanaannya pun sudah optimal. Meskipun BUMDes Taruna Mandiri tergolong masih baru dibentuk tapi sejauh ini tidak ada hambatan apa-

apa yang mampu mempengaruhi kinerja dari setiap pengurus. Sebagaimana pendapat dari John & Mary Miner (Moekijat 1998:10), menyatakan bahwa “ Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Defenisi tersebut memiliki presepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto (Zainal 2008:22), yaitu “fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi dapat diketahui sudah terlaksana dengan optimal. Hal ini bisa dilihat dari kedua indikator diatas para informan semuanya menjelaskan bahwa struktur organisasi dan ketetapan tupoksi yang ada di BUMDes Taruna Mandiri Desa Cibeber sudah bisa terlaksana dengan baik ditandai dengan tidak adanya kendala serta hambatan-hambatan yang ditemui. Sebagaimana merujuk pada pendapat

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang Implementasi Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya secara umum sudah terlaksana dengan optimal. Hal ini

dibuktikan dari 9 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, diketahui terdapat 5 indikator yang telah berjalan dengan optimal, dan terdapat 4 indikator yang belum berjalan. Diantaranya yaitu pada indikator adanya sosialisasi tentang pentingnya peran masyarakat terhadap kemajuan BUMDes, perlu adanya alternatif untuk pengelolaan sumber daya alam yang sudah tergali, adanya pemanfaatan sektor ekonomi, dan perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang kompeten demi kemajuan BUMDes.

Adapun hambatan yang muncul pada empat indikator yang belum optimal yaitu ketika pada saat proses sosialisasi dikarenakan tidak pernah dihadiri penuh oleh para pihak yang di undang untuk menghadiri kegiatan, jadi mengenai informasi yang disampaikan seringkali tidak tersampaikan semua dan tidak semua audiens bisa memahami atas apa yang di sampaikan. Mengenai kendala terhadap alternatif pengelolaan sumber daya alam, kendala yang paling menghambat adalah anggaran. Kendala yang muncul pada pemberdayaan ekonomi yaitu sama ada pada anggaran dan kurangnya animo masyarakat mengenai BUMDes dan masyarakat ada yang masih menganggap BUMDes itu sama seperti koperasi. Dan hambatan yang terakhir ada pada sumber daya manusia yang dirasa masih ada kekurangan yaitu kurang tenaga khususnya laki-laki dikarenakan sekarang pengurus

BUMDes semua pengurusnya perempuan.

Oleh sebab itu, agar pelaksanaan Implementasi Perdes No 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya bisa berjalan dengan optimal, maka seluruh pihak yang terkait seperti pihak Desa dan BUMDes diharapkan bisa mengatasi semua hambatan-hambatan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Anggara, Sahya, 2014, *Kebijakan Publik*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Agustino, Leo, 2017, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Handoko, Hani, 2007, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haryanto, 1978, *Sosialisasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hipludin, Agus, 2017, *Kebijakan, Birokrasi dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moekijat, 1998, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.

- Soekidjan, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugandha, Dann, 2011, *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Syahrudin, 2019, *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Syahriyatul, 2007, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Zainal, Abidin, 2008, *Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Zubaedin, 2007, *Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Nusa Media.
- Artikel/Jurnal**
- Imas Siti Masitoh, 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ciliang Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Universitas Galuh Ciamis 2019.
- Yeni Fajarwati, 2016 dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagenangan Kecamatan Pagenangan Kabupaten Tanggerang”. Universitas Sultang Geng Tirtayasa 2016.
- Dokumen-dokumen**
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Perdes Desa Cibeber Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Taruna Mandiri Desa Cibeber Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya.